

## STANDAR PELAYANAN

### SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

#### (SIPP KESWAN)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li><li>7. Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>9. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li><li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenaaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.</li><li>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;</li><li>12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nornor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li></ol>
2.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Bermaterai;</li><li>2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li><li>3. Rekomendasi dari organisasi profesi;</li><li>4. E-KTP</li><li>5. NPWP</li><li>6. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner</li><li>7. Sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan</li><li>8. Perjanjian kerjasama penyeliaan dengan dokter hewan</li><li>9. Ijazah Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan</li><li>10. Pas foto 4X6 sebanyak 3 lembar</li></ol>
3.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membuka website sicantik cloud (<a href="http://sicantik.go.id">http://sicantik.go.id</a>);</li><li>2. Pemohon meminta Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.</li><li>3. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon;</li><li>4. Pemohon Mengajukan permohonan Surat Izin Praktek;</li></ol>





		20. Media informasi layanan; 21. Sistem dan informasi antrian; 22. Survey kepuasan masyarakat elektronik; 23. Internet (Wifi); 24. Kamera (CCTV); 25. Pengukur suhu; 26. Ruang server.
8.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	- Sumberdaya manusia dibekali dengan bimbingan - bimbingan teknis mengenai perizinan - Mampu mengoperasikan komputer
9.	<b>Pengawasan internal</b>	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10.	<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan.</b>	1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : <a href="mailto:dpmpptspslawi@gmail.com">dpmpptspslawi@gmail.com</a> ; 3. Website : <a href="http://dpmpptsps.tegalkab.go.id">dpmpptsps.tegalkab.go.id</a> ; 4. SPAN Lapor : <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a> ; 5. Pengaduan dan Kuesioner online <a href="https://eimb.tegalkab.go.id/formpengaduan">https://eimb.tegalkab.go.id/formpengaduan</a> ; 6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 085725266206; 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Delapan ( 8 ) orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, Aktual, Profesional (MANTAP); 6. Surat izin ditanda tangani secara elektronik; 7. Surat izin dicetak dengan menggunakan QR code dan autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR oleh pemohon.
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelaksana</b>	1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</li> <li>• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;</li> <li>• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam</li> </ul>

		<p>Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang – kurangnya 1 kali dalam satu tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)</li><li>3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan Reward sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</li></ol>
--	--	---

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL

